

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era persaingan global, mutu atau kualitas lebih ditekankan pada pengertian “strategik.” Definisi strategik menyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Stoner et al (1996) mengemukakan, mutu adalah melakukan hal-hal yang tepat dalam organisasi pada langkah pertama atau sebelum pelaksanaan, bukan membuat dan memperbaiki kesalahan. Pengertian umum mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang *tangible* maupun yang *intangible*.

Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, dalam hal ini mengacu pada *proses pendidikan*, dan *hasil pendidikan*. Dalam “proses pendidikan” yang bermutu terlibat berbagai input, seperti bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumberdaya

lainya serta penciptaan suasana yang kondusif.¹Manajemen sekolah dan manajemen kelas berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam intraksi (proses) belajar mengajar baik antar guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas, baik konteks kurikuler maupun ekstra kurikuler, baik dalam lingkup substansi yang akademis maupun yang non-akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran. Mutu dalam konteks “hasil pendidikan” mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir cawu, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis (minalnya ulangan umum, Ebta atau Ebtanas). Dapat pula prestasi di bidang lain seperti prestasi di suatu cabang olah raga, seni, atau keterampilan tambahan tertentu minalnya computer, beragam jenis teknik, jasa. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangible*) seperti

¹ Connie Chairunnisa, *Manajemen Pendidikan Dalam Multi Perspektif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 210

suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya.

Mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Apabila dilihat dari definisi tersebut, mutu pendidikan bukanlah upaya sederhana, melainkan suatu kegiatan dinamis dan penuh tantangan.²

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen penting dalam pendidikan dan menjadi satu dari delapan standar Nasional Pendidikan. Begitu pentingnya sarana prasarana pendidikan sehingga setiap institusi berlomba-lomba untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan demi meningkatkan Akreditasi Sekolah. tidak itu saja, kelengkapan sarana prasarana pendidikan merupakan salah satu daya tarik bagi calon peserta didik.³

Tetapi sayangnya, sarana dan prasarana pendidikan di sekolah tidak dikelola dengan pengetahuan yang cukup

² Sri Minarti, *Manajemen Sekolah*, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hal. 330

³ Barnawi & M. Arifin, *Manajemen Sarana Dan Prasarana Sekolah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 7

sehingga sering terjadi ketidaktepatan dalam pengelolaan. Ketidak tepatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menyangkut cara pengadaan, penanggung jawab dan pengelola, pemeliharaan dan perawatan, serta penghapusan. Bahkan banyak pengelola yang kurang memahami standar dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Beberapa kasus membuktikan banyak sarana yang dibeli, padahal bukan menjadi skala prioritas utama suatu lembaga pendidikan. Hal yang paling tragis dan sering terjadi dalam budaya kita adalah mampu membeli tetapi tidak mampu merawat.⁴

Satu sisi harapan yang dibebankan pada dunia pendidikan sangat banyak, tetapi disisi lain dunia pendidikan mempunyai banyak masalah yang menghambat dalam meningkatkan Akreditasi. Salah satu masalah yang dihadapi oleh sekolah masalah sarana pendidikan. Sarana belajar yang lengkap akan menunjang akreditasi. Seorang yang belajar dibutuhkan konsentrasi yang penuh, perhatian sepenuhnya, dan pemusatan terhadap suatu hal dengan mengesampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan. Konsentrasi ini tidak akan

⁴ *Ibid.*, hal.10

berjalan dengan baik apabila tempat atau alat yang digunakan tidak mencukupi.

Masalah sarana pendidikan yang sering dihadapi setiap sekolah antara lain sarana penunjang yang kurang memadai dan pengelolaan sarana prasarana kurang optimal. Dalam pengelolaannya, pemeliharaan atau perawatan yang sering menjadi kendala utama. Mengingat belum ada profesional dalam menangani standar mutu sarana prasarana dalam meningkatkan Akreditasi sekolah.

Akreditasi adalah bagian dari sistem penjaminan mutu. Akreditasi mutu hakikatnya adalah suatu instrumen yang digunakan untuk memberi penjaminan mutu kepada masyarakat (shareholder) dan kepada mereka yang berkepentingan terhadap perguruan tinggi (stakeholder). Bahkan, antara sistem penjaminan mutu dengan sistem akreditasi memiliki kesamaan unsur yang membentuk sistem secara keseluruhan. Melalui pendekatan sistem, berbagai unsur utama yang membentuk akreditasi mutu dapat diurai dalam suatu anatomi organisasi.⁵

5 A. Hanief Saha Ghafur, *Manajemen Penjaminan Mutu Di Indonesia: Suatu Analisa Kebijakan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hal. 113-114

Akreditasi adalah salah satu usaha tuntutan pembaharuan sistem pendidikan untuk mencapai sekolah yang berkualitas, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diverifikasikan kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diverifikasikan jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.⁶

Menurut Achmad Sudrajat (2018), akreditasi adalah kegiatan penilaian atau asesmen sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. akreditasi adalah suatu kegiatan

⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

penilaian kelayakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi sekolah atau madrasah dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau madrasah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.⁷

Akreditasi adalah salah satu usaha tuntutan pembaruan sistem pendidikan untuk mencapai sekolah yang berkualitas, diantaranya sarana prasarana, yaitu diverifikasi sarana prasarana untuk melayani peserta didik, potensi daerah, dan Akreditasi, diverifikasi jenis pendidikan dilakukan secara profesional.⁸ Penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat, penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsi-prinsip pemerataan dan keadilan. Akreditasi sekolah bukan hanya pencapaian semata saja tetapi bagaimana kinerja dan langkah awal penyusunan yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk selalu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain.

Dalam rangka mencapai pendidikan yang bermutu dan berkualitas tersebut, pemerintah telah menyusun

⁷ Sukardi, *Evaluasi Program Pendidikan Dan Kepelatihan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hal. 183-184

⁸ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 52 tahun 2008 Kriteria dan Perangkat Akreditasi SMA/MA

peraturan tentang standar pendidikan yang tertuang secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan ini adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Program standarisasi, akreditasi dan sertifikasi.⁹

Pelaksanaan akreditasi pada suatu program atau lembaga tidak hanya diterapkan pada Lembaga Pendidikan Sekolah, Madrasah dan Perguruan tinggi (jalur formal), tetapi juga pada lembaga pendidikan keagamaan (jalur non formal) seperti Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah.¹⁰ Dalam sisdiknas tahun 2003 disebutkan pada pasal 60 ayat (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan, peran, dan fungsi lembaga pendidikan formal maupun non formal adalah sama dan sejajar sebagai lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan. Dan pada bulan Nopember

9 Supardi, Natsir Muhammad, *Analisis Kebutuhan Pengembangan Madrasah*, Jurnal Penelitian Keislaman Vol 3 nomor 1 Desember 2006

10 Kementerian Agama, *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penyelenggaraan Madrasah Diniyah*, 2011

11 UU Sisdiknas Tahun 2003 Pasal 60 Ayat 1

2009 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan surat edaran dengan No : DT .I .III/HM.01/890/2009 perihal penataan dan Akreditasi Pendidikan, yang melatar belakangi diadakanya program Akreditas Pendidikan.¹²

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di SMP Islam Az-Zahrah 2 Palembang, diketahui terdapat lapangan yang satu lapangan digunakan untuk beberapa rombongan belajar dengan hanya digunakan secara bergantian. Padahal seharusnya berdasarkan Standar Sarana dan Prasarana sekolah harus mempunyai lapangan khusus, di SMP Islam Az-Zahrah 2 Palembang itu sendiri telah terakreditasi A. Dari hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan salah satu guru di SMP Islam Az-Zahrah 2 Palembang, apabila dilihat secara umum diduga ketersediaan standar sarana dan prasarana belum mencukupi walaupun sudah menunjang kegiatan belajar mengajar selain itu pada sekolah tersebut belum diketahui secara detail mengenai ketersediaan dan kondisi sarana yang ada karena pencatatan dilakukan pada awal sarana dan prasarana tersebut datang.

12 Kementerian Agama, *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi*, hal.1

Berdasarkan berbagai pernyataan dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Implementasi Standar Mutu Sarana Prasarana Berbasis Akreditasi di SMP Islam Az-Zahrah 2 Palembang”. Karena sarana dan prasarana yang menjadi faktor pendukung utama dalam meningkatkan akreditasi melalui mutu pendidikan yaitu sarana/fasilitas sekolah, karena dengan adanya sarana/fasilitas sekolah yang memadai maka akan dapat mempelancar proses pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatannya dalam peningkatan mutu pendidikan dalam bentuk analisis kecukupan sarana dan prasarana untuk menyiapkan standar mutu sarana prasarana di SMP Islam Az-Zahrah 2 Palembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Standar Mutu Sarana Prasarana Berbasis Akreditasi di SMP Islam Az-Zahrah 2 Palembang?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Standar Mutu Sarana Prasarana Berbasis Akreditasi di SMP Islam Az-Zahrah 2 Palembang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tentang Implementasi Standar Mutu Sarana Prasarana Berbasis Akreditasi di SMP Islam Az-Zahrah 2 Palembang.
- b. Untuk mengetahui tentang faktor yang mempengaruhi Implementasi Standar Mutu Sarana Prasarana Berbasis Akreditasi SMP Islam Az-Zahrah 2 Palembang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi semua masyarakat yang membaca ataupun peneliti sendiri, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan sebagai literature bagi peneliti selanjutnya.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat serta memberi masukan-masukan kepada warga sekolah

baik kepala sekolah, staf pegawai, guru-guru, dan peserta didik untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka yang dimaksud disini adalah meninjau atau memeriksa daftar perpustakaan untuk mengetahui apakah permasalahan yang ada diteliti sudah adakah mahasiswa yang meneliti atau membahasnya, setelah diadakan pemeriksaan pada daftar skripsi di perpustakaan Tarbiyah UIN Raden Fatah Palembang, beberapa sumber kepustakaan dapat dijadikan tinjauan oleh penulis dalam upaya menganalisis dan memahami penelitian, antara lain:

Heri Kiswanto (2013) dalam skripsinya yang berjudul *“Efektivitas Program Akreditasi Terhadap Peningkatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Diniyah Binaul Ummah”*. Pada kesimpulan ia mengatakan penelitian yang ia teliti merupakan suatu bentuk penganalisaan dari data-data yang berhasil penulis kumpulkan dalam penelitian di Madrasah Diniyah Binaul

Ummah, dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Program Akreditasi ini berpengaruh terhadap peningkatan pembelajaran di Madrasah Diniyah Binaul Ummah, pengaruh program akreditasi tersebut antara lain; Madrasah Diniyah Binaul Ummah memiliki dokumen silabus secara tertulis, kriteria ketuntasan minimal menjadi bertambah, peserta didik menjadi lebih semangat dalam belajar karena didukung dengan adanya media, madrasah Diniyah mendapatkan Bantuan Operasional Pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran.¹³ Jadi perbedaan dengan yang akan penulis teliti yaitu dalam skripsi Heri Kiswanto lebih menitik beratkan kepada Efektivitas Program Akreditasi Terhadap Peningkatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Diniyah Binaul Ummah untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas Madrasah Diniyah Binaul Ummah.

Puspita Diah Ika (2013) dalam skripsinya yang berjudul "*Akreditasi Sekolah Dan Kinerja Guru Sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Parakan Kabupaten Temanggung*". Dalam kesimpulan ia mengatakan bahwa guru sejarah sekolah menengah atas negeri 1 perakan kabupaten temanggung menyusun silabus, rencana

¹³ Heri Kiswanto, *Efektivitas Program Akreditasi Terhadap Peningkatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Diniyah Binaul Ummah*, (Yogyakarta: Pendidikan Agama Islam, 2013), hal.89

pembelajaran, membuat media pengajaran, dan memvariasikan metode mengajar. Hal ini sebagai langkah persiapan guru sebelum mengajar serta keaktifan guru dalam melakukan kegiatan evaluasi dan remedial, di samping itu guru sejarah di sekolah Menengah Atas Negeri 1 Parakan Kabupaten Temanggung aktif mengikuti musyawarah guru mata pelajaran sejarah yang dilakukan satu kali dalam satu minggu. Guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Parakan Kabupaten Temanggung telah mampu dalam hal peningkatan mutunya dilakukan dengan cara; mengikuti penataran, mengikuti seminar, mengikuti workshop, mengikuti musyawarah guru mata pelajaran sejarah yang diadakan satu minggu sekali,. Adanya Akreditasi sekolah sangat berpengaruh dalam meningkatkan kinerja guru sejarah mulai dari kedisiplinan waktu mengajar, memberikan penugasan dan ulangan baik harian maupun ulangan umum, penilaian, pengevaluasian, remedial, administrasi.¹⁴ Di dalam skripsi Puspita Diah Ika dia untuk mengetahui pengaruh akreditasi sekolah dalam meningkatkan kinerja guru sejarah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Parakan Kabupaten Temanggung.

¹⁴ Puspita Diah Ika, *Akreditasi Sekolah Dan Kinerja Guru Sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Parakan Kabupaten Temanggung*, (Parakan: Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, 2013), hal.4

Setiyaningsih (2016) dalam skripsinya yang berjudul *“Hubungan Status Akreditasi Sekolah dan Kualitas Sekolah Di Sekolah Dasar (SD) Negeri Kota Batu”*. Hasil penelitian ia mengatakan hasil perhitungan menunjukan bahwa Sekolah SD Negeri kota Batu yang status Akreditasi A sebanyak 26% dan jumlah sekolah dengan status akreditasi B sebanyak 26% dan jumlah sekolah dengan status akreditasi C sebanyak 3%, hasil perhitungan nilai rata-rata untuk variabel kualitas sekolah adalah sekolah pada kategori kualitas tinggi sebanyak 60%, sekolah pada kategori kualitas sedang 40% dan sekolah dengan kategori kualitas rendah 0%, dan terdapat hubungan antara status akreditasi sekolah dengan kualitas sekolah namun sifat hubungan rendah. Faktor lain yang mempengaruhi kualitas sekolah yaitu tergantung pula pada kualitas guru, serta kualitas sarana dan prasarana bukan hanya pada status akreditasi sekolah. Saranah dalam penelitian ini adalah kepala sekolah SD Negeri di Kota Batu , hendaknya lebih memperhatikan pemenuhan standar nasional pendidikan, terutama dalam hal kelengkapan dokumen terkait dengan kurikulum dan pemenuhan kebutuhan peserta didik seperti kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, pengembangan hasil penelitian dapat dengan

menambahkan variabel seperti kepuasan peserta didik, kualitas layanan sekolah, dan kinerja guru di sekolah.¹⁵ Sedangkan dalam skripsi Setyaningsih hanya mengacu pada hubungan Status Akreditasi Sekolah dan Kualitas Sekolah, yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang Akreditasi. yang membedakan skripsi saya dengan tiga skripsi diatas adalah pada tempat dan lokasi penelitian sedangkan perbedaanya dengan skripsi yang akan penulis teliti lebih menitik beratkan pada standar mutu sarana Prasarana pada sekolah.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis ini penulis jadikan sebagai suatu batasan yang bersifat praktis dan sebagai ketentuan bagi pembuatan skripsi dan menjadi tolak ukur dalam suatu kegiatan penelitian yang meliputi:

1. Standar Mutu

Menurut Marzuki Mahmud, Standar Mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja.¹⁶ Secara umum yang dimaksud dengan

¹⁵ Setyaningsih, *Hubungan Status Akreditasi Sekolah Dan Kualitas Sekolah di Sekolah Dasar*, (Malang: Administrasi Pendidikan,2016), hal.90

¹⁶ Marzuki Mahmud, *Manajemen Mutu*, (Jakarta: Rajawali Pers,2012), hal.15

penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pelanggan, produsen atau pemberi layanan dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Standar mutu juga merupakan kompetensi atau kualitas minimum yang dituntut dari lulusan terkait, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator. Dalam siklus peningkatan mutu yang berkelanjutan, standar perlu dievaluasi dan direvisi atau ditingkatkan melalui *benchmarking* secara berkelanjutan. Standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan untuk mengembangkan mutu layanannya sesuai dengan program studi dan keahlian masing-masing.

2. Akreditasi

Menurut Dede Rosyada, akreditasi adalah sebuah proses untuk menilai bahwa fasilitas layanan dan pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah/madrasah teruji oleh pihak ketiga, sebuah lembaga akreditasi yang diakui publik, untuk menetapkan apakah layanan pembelajaran sekolah/madrasah terhadap para siswanya itu sudah memenuhi standar minimal atau belum.¹⁷ Jika seluruh standar minimal layanan tersebut telah terpenuhi oleh sekolah/madrasah, maka sekolah/madrasah tersebut terakreditasi dan memenuhi standar layanan minimal, dan diperkenankan untuk memberikan layanan pendidikan pada masyarakat. Sebaliknya jika tidak, maka masyarakat akan secara kualitatif menilai bahwa institusi tersebut tidak memiliki kelayakan untuk memberikan layanan pendidikan pada masyarakat. Demikian, sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 60 ayat (1), bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

¹⁷ Dede Rosyada, *Madrasah dan Profesionalisme Guru*, (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017), hal.21-23

Dalam sistem penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, dibedakan antara izin penyelenggaraan dengan penilaian. Izin penyelenggaraan dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengelola pendidikan, baik kementerian pendidikan maupun kementerian teknis yang diberi kewenangan menyelenggaraan pendidikan. Sementara akreditasi dilaksanakan oleh suatu lembaga independen yang dibentuk oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Seperti diketahui, akreditasi merupakan amanat Undang-undang. Keharusanya ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 86 ayat 1 dan 2, bahwa pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan suatu pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan atau suatu pendidikan. Kewenangan Akreditasi, sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan akreditasi. Dengan demikian, akreditasi dilakukan untuk melindungi masyarakat dan layanan pendidikan yang

tidak sesuai standar, yang akan melahirkan anak-anak tidak sesuai harapan.

Akreditasi Sekolah atau Madrasah bukan isu baru dalam dunia pendidikan di mancanegara. Di Amerika Serikat terdapat 52 badan yang diakui untuk melakukan akreditasi dan sertifikasi, yang diarahkan untuk sertifikasi yang lebih spesifik, seperti akreditasi laboratorium sekolah dan perpustakaan sekolah. di India, sejak 1956 di bentuk lembaga akreditasi bernama University Grant Commission (UGC) dengan 12 cabang wilayah akreditasinya seperti akreditasi untuk distance learning, akreditasi untuk *dentist education*, dan *nursing educatio*. Malaysia juga telah memiliki lembaga akreditasi sejak 1996. Negara-negara lain juga memiliki kepedulian sama terhadap pendidikan dengan membentuk dan menyelenggarakan evaluasi eksternal untuk melihat kelayakan lembaga pendidikannya dalam memberikan layanan pendidikan pada masyarakat.

Secara ideal, akreditasi memiliki fungsi yang cukup penting bagi pengembangan kualitas lembaga pendidikan. Pada sekolah atau madrasah, secara fungsi akreditasinya dapat digambarkan sebagai berikut: *pertama*, untuk memetakan kelemahan-kelemahan

yang dimiliki sekolah. tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan-perbaikan kedepan sehingga dapat memberikan layanan terbaik bagi para *school client-nya*. *Kedua*, untuk memperoleh pengakuan dari paraah pemakai lulusan, pelanggan, sekolah, dan pada akhirnya agar dapat melahirkan lulusan yang kompotitif, karena semangkin baik penyelenggaraan sekolah/madrasah, maka akan semangkin baik luusannya. *Ketiga*, untuk meningkatkan kepercayaan dan ekspektasi masyarakat terhadap sekolah atau madrasah, sehingga mereka mempercayakan putra putrinya untuk belajar di sekolah/madrasah yang terakreditasi tersebut.

Oleh sebab itu, pasal 86 ayat 3 Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menegaskan bahwa akreditasi tersebut harus dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Selain itu, Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 menegaskan bahwa Standar Minimal Layanan Pendidikan harus diukur secara komprehensif meliputi delapan aspek yang sangat mendasar dalam pendidikan, yakni; standar isi, standar proses, standar

komperensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

3. Standar Mutu Sarana Prasarana

Menurut Sulistyorini, pengertian Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berkreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁸ Pada pasal 42 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarna yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidikan, ruang

¹⁸ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hal.115-116

pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Pemeliharaan sarana prasarana di atur dalam pasal 47 bahwa sarana prasarana menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan. Pemeliharaan dilakukan secara berkala.

Dengan uraian diatas maka standarisasi sarana prasarana sekolah sangat diharuskan karena untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat mendapatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Dalam peratuaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang standar Sarana dan Prasarana Sekolah. Standar Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama SMP. Satuan pendidikan, Satuan SMP/MTs memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar, satu SMP/MTs dengan tiga rombongan belajar melayani 2000 jiwa. Untuk

pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SMP/MTs baru, Satu kecamatan dilayani oleh minimum satu SMP/MTs yang dapat menampung semua lulusan SD/MI dikecamatan tersebut, Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMP/MTs dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.¹⁹ Kelengkapan Prasarana dan Sarana Sebuah SMP/MTs sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut; ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konsling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/olahraga.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan bukanlah upaya sederhana, melainkan suatu kegiatan yang penuh tantangan dan masalah. Seiring dengan perubahan zaman, pendidikan akan

¹⁹ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana.

selalu berubah-ubah. Oleh karena itu pendidikan senantiasa membutuhkan upaya rehabilitasi dan peningkatan mutu sejalan dengan semakin tingginya animo masyarakat terhadap dunia pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan untuk bersaing dengan dunia luar.

F. Definisi Konseptual

1. Implementasi

Implementasi atau penerapan adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai, dan sikap. Implementasi diartikan sebagai suatu proses penerapan ide, konsep dan kebijakan tertentu dalam suatu aktivitas sehingga menghasilkan kemampuan tertentu sebagai hasil intraksi dengan lingkungan.²⁰

2. Standar Mutu

Standar adalah suatu ukuran atau patokan untuk mengukur kuantitas, berat, nilai atau mutu. Mutu adalah kepuasan pelanggan. Jadi dapat disimpulkan standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem

²⁰ Kompri, *Manajemen Sekolah: Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.172

pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Standar mutu adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan terdiri dari spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan.²¹

3. Sarana Prasarana

a. Sarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dengan kata lain sarana lebih ditujukan untuk benda-benda atau peralatan yang bergerak.

Contoh: sarana pada suatu kantor atau sekolah adalah komputer, meja, kursi, papan tulis, infokus, kapur, buku, pulpen, kertas, rak dokumen, pengaris, alat absensi, dan contoh sarana lainnya.

b. Prasarana

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses

²¹ Suyadi Prawirosentono, *Manajemen Mutu Terpadu: Total Quality Management*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hal.45

(usaha, pembangunan, proyek). Adapun proses tersebut dapat berupa suatu usaha, pembangunan, ataupun proyek.

Contoh: prasarana pada suatu kantor atau sekolah adalah gedung, ruang belajar, dan tanah lapang.

Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar mengajar. Menurut rumusan Tim Penyusun Pedoman Pembakuan Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.²²

Sri Minarti menyebutkan, sarana pendidikan adalah perlengkapan yang secara langsung digunakan untuk proses pendidikan, seperti meja, kursi, kelas, dan media pengajaran. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun, dan taman.²³ Dalam hubungan dengan sarana pendidikan

22 Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: aditya Media Bekerjasama Dengan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta,2008), hal.273

23 Sri Minarti, *Manajemen Sekolah: mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2011), hal. 251

Nawawi (1987) mengklasifikasikan menjadi beberapa macam sarana pendidikan, yaitu ditinjau dari sudut: habis tidaknya dipakai; bergerak tidaknya pada saat digunakan; dan hubungannya dengan proses pembelajaran.

Ditinjau dari habis tidaknya dipakai, ada dua macam sarana pendidikan. Sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana yang tidak tahan lama. Sarana pendidikan yang habis pakai merupakan bahan atau alat yang apabila digunakan dapat habis dalam waktu yang relatif singkat. Misalnya kapur tulis, tinta printer dan lain sebagainya. Ada pula sarana pendidikan yang tahan lama yaitu bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus menerus atau berkali-kali dalam waktu yang relatif lama. Contohnya meja, kursi, computer, atlas, globe dan alat-alat olahraga.²⁴

Sarana pendidikan yang bergerak merupakan sarana pendidikan yang dapat digerakkan atau dipindah tempatkan sesuai dengan kebutuhan para pemakainya. Contohnya, meja, dan kursi, lemari arsip, dan alat-alat praktik. Kemudian, untuk sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah sarana pendidikan yang tidak dapat

²⁴ Barnawi & M. Arifin, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, (Jokjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal.50

dipindahkan atau sangat sulit jika dipindahkan, misalnya saluran kabel listrik, saluran dari perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan LCD yang dipasang permanen.

Dalam hubungan dengan proses pembelajaran, sarana pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran. Alat pelajaran adalah alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya buku, alat peraga, alat tulis, alat praktik. Alat peraga merupakan alat bantu pendidikan yang dapat berupa perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang dapat menkonkretkan materi pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana pendidikan yang berfungsi sebagai perantara dalam proses pembelajaran sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Media pengajaran ada tiga jenis, yaitu visual, audio dan audiovisual.

Sedangkan prasarana pendidikan disekolah bisa diklasifikasikan menjadi dua macam, pertama, prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik ketrampilan, dan

ruang laboratorium. Kedua, prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Contohnya, ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah dan tempat parkir.

4. Akreditasi SMP/MTs

Akreditasi Sekolah tingkat SMP menurut Sulola Tirtarahardjo adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk menentukan kelayakan program satuan pendidikan tingkat SMP/MTs berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.²⁵ Akreditasi merupakan proses yang harus dilalui setiap lembaga pendidikan untuk mendapatkan predikat dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan akreditasi, setiap lembaga pendidikan baik sekolah maupun madrasah akan mendapatkan pengakuan kelayakan untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan

²⁵ Sulola Tirtarahardjo, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hal.42

formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Sekolah merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran (menurut tingkatnya).

Dengan demikian akreditasi sekolah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga mandiri yang berwenang. Untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Jadi, penerapan Standar Mutu Sarana Prasarana Berbasis Akreditasi yaitu bagaimana suatu lembaga tersebut mengelola atau menerapkan suatu kebijakan yang diberikan oleh pendidikan atas dasar kemandirian dengan kemampuan yang ada untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan ke arah yang lebih baik.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah (mendeskripsi) yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi

peneliti juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan yang bersifat komperatif dan korelatif.²⁶

b. Pendekatan Penelitian.

Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan pokok permasalahan yang hendak di bahas dalam penelitian inikemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.²⁷ Jadi data kualitatif tidak memakai angka tapi berupa penjabaran di dalam kalimat.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data berupa pendapat (pernyataan) sehingga tidak berupa angka akan tetapi berupa kata-kata atau kalimat.²⁸ Jadi data kualitatif adalah data berupa kalimat seperti

26 Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,2007), hal.44

27 Saipul Annur, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Palembang:Grafika Telindo Press,2008), hal.129

28 Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Perhitungan Manual & SPSS*, (Jakarta: Kencana,2013), hal.16

sangat baik, baik, buruk dan sangat buruk, tentang implementasi standar mutu berbasis akreditasi di SMP Islam Az-Zahrah 2 Palembang yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap informan (kepala sekolah dan guru) yang sudah peneliti tentukan.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

- 1) Sumber data primer penelitian ini adalah kepala sekolah.
- 2) Sumber data sekunder penelitian ini adalah guru-guru, dan siswa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, maka penulis menggunakan berbagai teknik yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²⁹ Penulis mengamati secara langsung dan mencatat secara sistematis tentang

²⁹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hal.104

kondisi di lapangan mengenai keadaan administrasi pendidikan, keadaan administrator, sarana dan prasarana sekolah, kepegawaian, keuangan, dan hal yang berkaitan dengan Standar Mutu yang ada di SMP Islam Az-Zahrah 2 Palembang sehingga dapat meningkatkan Akreditasi sekolah.

Pada awal observasi ke lokasi penelitian hanya mengamati dan melihat informan dan keadaan lingkungan sekolah, dan membuat catatan apa saja yang di dapatkan oleh peneliti pada saat observasi awal.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.³⁰ Jadi wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh data, dengan cara mengajukan pertanyaan mengenai Implementasi Standar Mutu Berbasis Akreditasi di SMP Islam Az-Zahrah 2 Palembang serta hal-hal yang terkait.

Penulis dalam penelitian ini mengadakan tanya jawab secara langsung, dengan cara mengajukan pertanyaan kepada:

a) Informan kunci/pokok yaitu kepala sekola.

³⁰ Lexi J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal.135

b) Informan pendukung adalah, guru-guru, dan siswa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui arsip-arsip tentang objek penelitian. Data dokumentasi ini digunakan untuk lebih memperkuat atau melengkapi data yang telah di peroleh dari wawancara.³¹ Jadi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan yang tertulis seperti arsip-arsip, buku-buku dan lain-lainya. Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang letak geografis, keadaan guru, keadaan siswa, dan keadaan sarana dan prasarana serta untuk mendapatkan data tentang hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data ini penulis menggunakan cara analisis data non statistik, karena penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif deskriptif, maka setelah data terhimpun kemudian klasifikasi editing dan hubermen yang dikutip oleh saipul annur, yaitu sebagai berikut:³²

31 Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta,1999), hal.39

32 Saipul Annur, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif)*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press,2005), hal.181

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih memfokuskan, membuang dan mengorganisasikan data dalam suatu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.³³ Yaitu proses penyederhanaan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis dilapangan melalui beberapa tahapan, yaitu: membuat ringkasan, mengkode, menulis tema, membuat gugus-gugus, membuat partis dan membuat memo.

b. Penyajian Data

Yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

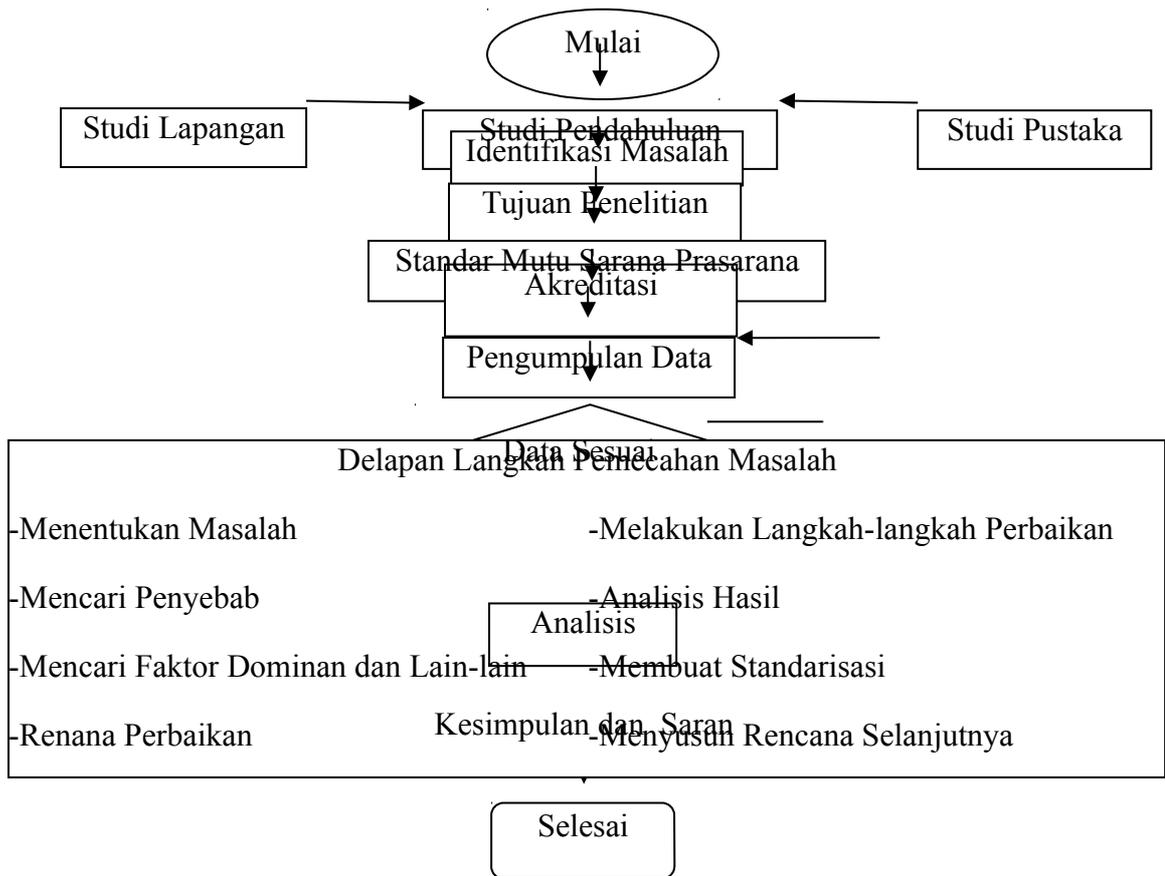
Yaitu makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yaitu merupakan validitas.

d. Triangulasi

³³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2014), hal.479

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data. Dalam triangulasi data ini menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada untuk mengetahui valid atau tidaknya sebuah data yang telah ada tentang Implementasi Standar Mutu Sarana Prasarana Berbasis Akreditasi di SMP Islam Az-Zahrah 2 Palembang.

Gambar 1.1 Alur Metode Penelitian



B. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan dalam penyampaian tujuan, pembahasan ini akan dibagi atas beberapa bab dan dibagi lagi atas beberapa sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I: Berisikan pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori,

definisi konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisikan landasan teori, dalam bab ini terdiri dari teori yang berkaitan dengan Implementasi Standar Mutu Sarana Prasarana Berbasis Akreditasi di SMP Islam Az-Zahrah 2 Palembang.

BAB III: Berisikan tentang gambaran secara umum lokasi penelitian, yang meliputi; sejarah berdirinya, letak geografis, visi, misi, dan tujuan, identitas sekolah, keadaan tenaga pendidik dan kependidikan, keadaan siswa, keadaan guru, pelaksanaan tugas guru, sarana dan prasarana sekolah, akreditasi, struktur organisasi.

BAB IV: Berisikan inti pembahasan, yang meliputi: analisis terhadap data yang berkaitan dengan persoalan pokok yang dikaji, analisis tersebut meliputi penerapan standar mutu sarana prasarana berbasis akreditasi, dan faktor yang mempengaruhi implementasi standar mutu sarana prasarana berbasis akreditasi di SMP Islam Az-Zahrah 2 Palembang.

BAB V: Berisikan penutup, meliputi kesimpulan dan saran